BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Pemilu sudah ada sejak tahun 1955 tepat 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Namun, pada masa itu pelaksanaan pemilu belum 100% sempurna karena masyarakat tidak secara langsung memilih calon legislatif dan calon presiden yang sesuai dengan pilihan hati nurani mereka. Calon legislatif ditunjuk langsung oleh partai yang mengusungnya untuk mewakili partai tersebut di senayan. Sedangkan calon presiden sendiri ditunjuk oleh DPR melalui persetujuan MPR. Pada calon kepala desa ditunjuk oleh tingkatan diatasnya. Hal ini berlangsung sampai pemilihan Megawati sebagai Presiden.

Pada tahun 2004, kebijakan selama orde lama sampai orde reformasi tersebut mengalami perubahan. Pada tahun tersebut pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih bebas memilih. Mulai tahun tersebut rakyat Indonesia bebas memilih pemimpin sesuai dengan pilihan hatinya melalui pemilihan umum yang digelar setiap lima tahun sekali. Namun kali ini pemilihan umum yang seharusnya memiliki asas LUBER-JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) dalam kenyataannya masih menemui banyak hambatan. Asas LUBER-JURDIL tersebut tidak dipraktekkan secara baik dan benar. Asas jujur dan adil hanya tertuang dan termaktub pada teks buku bacaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kewarganegaraan saja. Namun, dalam praktek dan kenyataannya di lapangan, asas tersebut tidak dilaksanakan secara baik dan benar oleh pada individu ataupun orang-orang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif maupun calon pemimpin daerah dan bahkan para calon pemimpin negara pun masih banyak yang tidak mempraktekkan asas LUBER-JURDIL tersebut. Banyak kecurangan yang dilakukan oleh warga masyarakat maupun pihak-pihak tertentu untuk menaikkan jumlah dukungan atau memperbanyak jumlah suara mereka serta memberi pencitraan yang baik di depan masyarakat agar dirinya terkesan layak untuk terpilih menjadi anggota legislative yang berkompeten.

Untuk menambah jumlah suara, para calon legislative tersebut menonjolkan pencitraan yang terkesan baik terhadap masyarakat. Para calon legislative ataupun calon kepala daerah yang mencalonkan diri pada pesta demokrasi tidak segan-segan menguras harta kekayaan mereka demi kenaikan jumlah suara yang nantinya akan diberikan oleh masyarakat untuk mendongkrak popularitasnya. Mereka beranggapan bahwa semakin banyak uang yang mereka keluarkan bagi masyarakat, maka semakin banyak suara atau dukungan yang akan ia dapatkan dari masyarakat.

Kecurangan tidak hanya berasal dari oknum-oknum calon legislative saja, masyarakat pun juga memiliki peran serta andil yang sama dalam kecurangan dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh partai politik dan para calon legislative dalam pesta demokrasi. Ketika masyarakat diam saja pada saat diberi sejumlah uang atau hal-hal lain oleh calon legislative, pihak – pihak tertentu atau siapapun untuk memuluskan niat mereka dalam mencalonkan diri, maka secara tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung masyarakat ikut “berpartisipasi” dalam pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh partai politik dan pihak - pihak yang tidak bertanggang jawab. Hal tersebut diperparah lagi dengan keadaan ekonomi negara Indonesia yang semakin hari semakin sulit seperti sekarang ini. Hal tersebut membuat masyarakat mau menggadaikan hak suara mereka dengan iming-iming (imbalan) uang pemberian para calon legislative tersebut. Kebanyakan dari masyarakat bahkan ada yang memilih calon berdasakan jumlah nominal uang yang mereka dapatkan. Dan apabila ia tidak mendapatkan uang dari calon legislatif ataupun calon pemimpin yang mencalonkan diri, maka mereka cenderung malas dan bahkan tidak mau untuk menggunakan hak pilihnya. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh calon legislatif dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang secara implicit mempunyai makna meminta dukungan dan suara rakyat untuk memuluskan niatnya agar bisa duduk di kursi DPR di Senayan atau bahkan menuju kursi RI 1 (presiden).

Praktek money politik seperti ini tidak hanya terjadi pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden saja. Money politik sekarang ini sudah merambah pada tingakatan dibawahnya. Bahkan pemilihan kepala desa pun tidak luput dari praktek-praktek money politik seperti ini. Sungguh ironi dalam negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi terdapat praktek money politik yang sangat merugikan semua pihak tidak hanya masyarakat awam saja, akan tetapi juga para calon yang bersaing dalam pemilihan pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif. Namun, pemerintah seolah “menutup mata” dengan masalah tersebut dan bahkan mungkin para petinggi negara menganggap money politik adalah hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang biasa dan wajar terjadi. Jika ada warga masyarakat yang tidak mau menerima uang “panas”tersebut, para Calon legislatif yang curang tersebut akan memandang sinis atau bahkan akan melakukan hal-hal yang membahayakan nyawa masyarakat dan mungkin saja anggota masyarakat tersebut akan di *Labelling* oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut dengan label negatif.

Demokrasi yang notabene adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, pada masa sekarang sudah dipandang dengan paradigma berbeda oleh sebagian masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kelas atas. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan di Indonesia, mereka dapat mempengaruhi masyarakat lainnya terutama masyarakat ekonomi rendah dan yang memiliki pendidikan rendah untuk memilihnya sebagai wakil mereka dengan “rayuan” akan “merangkul” masyarakat ekonomi rendah dan berjanji akan mengubah keadaan negara Indonesia menjadi lebih baik. Masyarakat ekonomi rendah secara tidak sadar akan mendukung mereka (masyarakat kelas atas yang memiliki kekuasaan) dan tidak menutup kemungkinan akan memberikan suara mereka kepada calon yang menggunakan jalan money politik itu. Penggadaian suara tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk mendapatkan uang banyak tanpa mau bersusah payah terlebih dahulu. Padahal jika difikir matang-matang, uang dari hasil money politik itu jumlahnya tidak seberapa dan akan habis dalam sekejap.

Dengan realitas sosial seperti itu, jelas sekali bahwa sebenarnya para calon yang bersaing dalam pemilu legislatif tersebut merasa tidak siap dan tidak percaya diri dengan kemampuan individu yang dimiliki oleh dirinya. Secara tidak langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka juga mengakui bahwa tingkat elektabilitas masyarakat terhadap dirinya rendah. Oleh sebab itu mereka tidak segan lagi untuk meminta dukungan dan suara masyarakat agar terkesan bahwa ia memiliki tingkat elektabilitas tinggi di masyarakat. Dengan cara seperti itu ia juga bisa memperlihatkan kepada lawan politiknya bahwa ia bisa diterima di masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah. Ia bahkan tidak menyadari bahwa dengan cara money politik itu pula ia dapat memperlihatkan pada masyarakat bahwa ia sebenarnya belum "melek" demokrasi dan ia bukanlah orang yang berkompetan untuk menjadi wakil rakyat di dunia perpolitikan Indonesia.

Ketika Republik Indonesia diproklamirkan pada tahun 1945, salah satu program yang dilancarkan oleh para bapak bangsa (*Founding Fathers*) ialah penyelenggaraan pemilu. Namun, pemilu belum mungkin dilaksanakan selama bertahun-tahun karena masih berlangsung perang kemerdekaan melawan tentara kolonial belanda. Ketika perang kemerdekaan berakhir pada tahun 1949, wakil presiden Mohammad Hatta mengeluarkan maklumat wakil presiden No. X/ 1949 yang bertujuan meliberalisasikan sistem politik. Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka Wakil Presiden membentuk UUDS 1950. Setelah terbentuk, UUD 1950 menggantikan posisi UUD 1945 yang berlaku sebelumnya. UUDS ini juga menggantikan sistem pemerintahan Indonesia yang awalnya adalah sistem pemerintahan *Presidensial* menjadi sistem pemerintahan *Parlementer*. Namun sistem tersebut dianggap gagal karena kabinet terus menerus dalam situasi yang tidak stabil. Secara politis pada saat itu kabinet hanya mampu bertahan selama dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun. Legitimasi sistem konstitusional juga terancam oleh sejumlah gerakan pemberontakan.

Menjelang tahun 1967, Mayjend Soeharto telah melucuti kekuasaan presiden Soekarno. Sebuah rezim otoriter baru yang disebut “Orde Baru ” dibentuk. oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya yang memuji Soeharto karena keberhasilannya menumpas PKI. Orde baru mulai mempersiapkan pemilunya yang pertama yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 1971[1]. Dengan demikian pemilu pada saat itu masih dalam tahap permulaan dan merupakan pesta rakyat pertama yang dilakukan negara Indonesia setelah kemerdekaan.

Menurut Karim Rusli, ada dua alasan penting mengapa pemilu perlu untuk dilaksanakan. Pertama untuk melaksanakan prinsip demokrasi. Kedua untuk mencapai stabilitas politik, mengakhiri krisis kabinet, kelambanan dan kegagalan pemerintah, dan menciptakan parlemen yang representatif. Akan tetapi menurut Prof. Soenario SH dengan adanya pemilu ini rakyat berharap dapat segera tercipta stabilitas politik yang akan memperbaiki kehidupan parlemen[2].

Pemilu merupakan sebuah proses bagi rakyat untuk memilih pemimpin negara. Oleh sebab itu, sudah selayaknya rakyat diikutsertakan sebagai penyelenggara pemilu. Penyelenggraan pemilu secara *fair* sangatlah penting karena pemilu merupakan sarana demokrasi sekaligus perwujudan kehendak rakyat. Apabila pemilu tersebut diselenggarakan secara tidak sehat, serta diwarnai berbagai bentuk

[1] Frederich Ebert Stiftung. *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur* (Jakarta. Pensil – 324. 2003) hal 101- 103
[2] Rusli Karim. *Pemilu Demokratis Kompetitif* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya. 1991), Hal 14-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aksi kecurangan, maka keinginan rakyat yang sesungguhnya tidak akan tewujud. Bahkan tujuan awal dari penyelenggaraan pemilu yang berupa pelembagaan dan pembudayaan politik tidak akan tercapai[3]. Maka dari itu pada saat pesta demokrasi ini berlangsung seluruh lapisan masyarakat harus dilibatkan jangan sampai ada masyarakat yang tidak mengikuti pemilu ini yang nantinya menyebabkan angka golput semakin tinggi.

Berkaitan dengan observasi yang dilakukan peneliti di Desa Sukoreno ditemukan fakta bahwa di lokasi ini masih banyak para bakal calon (balon) pemimpin baik di tingkat tertinggi maupun tingkat terendah, terutama tingkat legislatif dan kepala desa menggunakan cara money politik untuk mendongkrak dan menambah jumlah suara dalam pemilihan langsung yang dilakukan di desa ini. Mereka bahkan rela melakukan apapun demi mendulang jumlah suara dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu warga masyarakat terutama masyarakat kelas menengah kebawah. Adapun cara yang mereka lakukan adalah dengan membagikan sembako kepada warga baik itu berupa beras, gula, minyak, mie instan atau bahkan secara terang-terangan memberikan sejumlah uang yang berkisar antara Rp.30.000 sampai dengan Rp. 50.000 kepada masyarakat agar mereka memilihnya sebagai calon legislatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang mana beliau adalah salah satu perangkat Desa, beliau mengatakan bahwa Pemerintah desa pun seakan membiarkan praktek money politik tersebut terus terjadi. Meskipun sebenarnya mereka sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai

[3] Parulian Donald. *Menggugat Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997), Hal 12-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahaya dan larangan dari praktek money politik itu sendiri. Namun, karena money politik ini sudah menjadi sebuah hal yang biasa bagi masyarakat desa, dan sudah melembaga di masyarakat. Akhirnya pemerintah desa membiarkan hal ini terjadi selama masih sewajarnya dan tidak menimbulkan kekacauan di Desa. Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mengetahui fenomena politik uang yang terjadi di Desa tersebut pada saat Pemilihan Umum berlangsung.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka diperlukan penelitian lebih mendalam secara kualitatif agar dapat memberikan kejelasan tentang hal yang masih bersifat tabu mengenai **"**PEMILU DAN PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI DESA SUKORENO KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER**".**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, agar dalam pengkajian permasalahan pokok yang akan diteliti lebih terarah, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk politik uang dalam pemilihan calon legislatif pada pemilu 2014 di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ?
2. Mengapa terjadi praktek politik uang dalam pemilu legisatif di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul proposal yang saya bahas dengan memfokuskan pada permasalahan politik uang yang ada pada masyarakat Desa Sukoreno serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bentuk Money Politik dalam pemilihan calon legislatif pada pemilu 2014 di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
2. Mengetahui penyebab terjadinya Money Politik di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana umumnya karya ilmiah yang memiliki nilai guna, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini disamping sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tugas akhir dalam program strata 1 (S1) Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, juga diharapkan mampu menambah keilmuan penelitian dalam bidang ilmu sosial secara mendalam.

b. Bagi Program Studi Sosiologi

Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi mengenai Praktek Politik Uang dalam Pemilihan Caleg Pada Pemilu 2014 di Desa Sukoreno Kabupaten Jember Jawa Timur dan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bagi Universitas

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai perbendaharaan perpustakaan untuk keperluan ilmiah selanjutnya.

d. Bagi Masyarakat Desa Sukoreno Kabupaten Jember

Dapat memberikan kontribusi yaitu menambah wawasan masyarakat desa khususnya masyarakat awam mengenai praktek serta bentuk-bentuk money politik yang terjadi di daerah tersebut dengan harapan nantinya masyarakat dapat menghindari dan bahkan menolak praktek-praktek money politik yang merugikan dirinya serta orang lain dalam dunia perpolitikan di Indonesia.

e. Bagi Peneliti Lain

Dapat memberikan informasi atau gambaran bagi peneliti lainnya mengenai praktek politik uang dalam pemilihan calon legslatif (caleg) pada pemilu 2014 di Desa Sukoreno Kabupaten Jember Jawa Timur.

E. Definisi Konseptual

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang judul penelitian diatas, ada baiknya peneliti menjelaskan definisi dari masing-masing konsep yang menjadi fokus kajian penelitian ini.

a. **Pemilu**

Syahrial Syarbani menjelaskan tentang gagasan A Sudiharto mengenai pemilu sebagai berikut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Pemilihan Umum adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Sebab rakyak memiliki hak untuk memilih[4].

Mengutip pernyataan dari Axel Hadenius, pemilu dapat disebut demokratis apabila memiliki "makna". Istilah "bermakna" merujuk pada tiga kriteria yaitu keterbukaan, ketepatan dana dan keefektivan pemilu. Jelas bahwa ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada hari pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu dilakukan kampanye pemilu dan sewaktu dilakukan penghitungan suara. Akhirnya kriteria itu berarti bahwa para pejabat yang terpilih benar-benar akan menduduki jabatannya.

Keterbukaan pemilu berarti bahwa akses pada pemilu harus terbuka bagi setiap warga Negara, bahwa ada pilihan dari antara alternatif politik yang riil, dan bahwa hasinya tidak ditentukan sebelumnya. Akses yang terbuka berarti bahwa hak pilih benar-benar bersifat universal. Ini berarti seluruh warga negara memiliki hak pilih.

Pemilu hanya akan kompetitif bila secara hukum dan kenyataan tidak menetapkan pembatasan dalam rangka untuk menyingkirkan calon-calon atau kelompok tertentu atas alasan politik. Pemilih juga harus memiliki pilihan diantara berbagai alternative politik yang ada.

Kriteria mengenai 'ketepatan' bertujuan pada pendaftaran dan identifikasi pemilih, kampanye dan prosedur pemilu dalam pengertian yang lebih ketat yaitu semua calon harus mempunyai akses kepada media negara dan swasta berdasarkan

[4] Syahrial Syarbani, dkk. *Sosiologi dan Politik* .(Jakarta: Ghalia Indonesia) hal 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

standard hukum yang sama. Aparatur negara harus netral pada saat penyelenggaraan pemilu.

Pemilu yang dirumuskan sebagai ungkapan bermakna dari kehendak rakyat lebih dibutuhkan dibanding pada saat sebelum dan sesudah berlangsungnya pemilu. Pada saat sebelum dan sesudah pemilu, selain memiliki hak dan kebebasan untuk memilih, masyarakat juga memiliki hak- hak lain yaitu hak-hak dalam kebebasan berbicara, dan hak berdemonstrasi, hak untuk memperoleh informasi dan kebebasan pers. Hak-hak tersebut juga diperlukan untuk merumuskan opini politik, sirkulasi pandangan politik, serta control atas proses politik. Penyebaran dan penerimaan informasi dan berita tidak boleh tunduk pada pembatasan yang bermotif politik. Kebebasan pers dan informasi harus dijamin oleh peradilan yang independen[5].

Berdasarkan pada definisi diatas, secara garis besar dapat penulis simpulkan bahwa pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu dapat disebut demokratis apabila memiliki "makna". Istilah "bermakna" merujuk pada tiga kriteria yaitu keterbukaan, ketepatan dana dan keefektivan pemilu. Focus kajian penulis disini adalah tentang Pemilu Legislatif yang berlangsung di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

[5] Frederich Ebert Stiftung. *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur* (Jakarta. Pensil – 324. 2003) hal 12- 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Politik Uang

Money politik adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum[6].

Indra Ismawan menyatakan bahwa "politik uang bisa diartikan upaya mempengaruhi perilaku seseorang dengan menggunakan imbalan tertentu…. Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum di suatu negara[7].

Adapun dasar hukum larangan melakukan praktek money politik adalah Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No 3 tahun 1999 yang berbunyi :

"Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu"[8].

Larangan Money Politik Selain Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No 3 tahun 1999, juga telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang – Undang RI

[6] http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang
[7] Indra Ismawan. *Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta : Media Pressindo. Hal 56
[8] http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang berbunyi : “

1. Pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu presiden dan wakil presiden sebelum, selama dan sesudah masa kampanye masa kampanye.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.

Larangan Money Politik juga dijelaskan dalam Pasal 115 ayat (8) Undang-Undang Pemilu No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:
“Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan kajiannya pada money politik yang dalam kenyataannya tidak hanya berupa uang saja, akan tetapi juga suatu barang atau benda yang diberikan kepada warga secara cuma-cuma oleh seseorang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencalonkan diri sebagai anggota legislative ataupun oleh para pendukung (tim sukses) calon legislatif tersebut yang bertujuan agar masyarakat memilihnya sebagai anggota legislatif dan seseorang yang mencalonkan diri tersebut mendapatkan jumlah suara lebih banyak yang nantinya akan mengantarkan dia duduk di kursi parlemen.

c. Pemilu Legislatif

Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009 dan yang keempat akan terjadi pada tahun 2014 dan pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 33 provinsi dan 497 kota.

Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri akan dipilih 560 anggota yang diambil dari 77 daerah pemilihan bermajemuk yang dipilih dengan cara sistem proporsional terbuka. Nantinya tiap pemilih di pemilu legislatif akan mendapatkan satu surat suara yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di kertas suara tersebut akan ada berbagai partai politik serta calon anggota legislatif yang mencalonkan diri di daerah dimana tempat pemilih tersebut berada. Cara memilihnya adalah dengan mencoblos satu lubang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada gambar calon anggota legislatif yang dipilih atau di gambar partai politik yang anda pilih.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai 132 anggota, 132 anggota tersebut merupakan 4 perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sistem memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah memakai sistem Single Non Tranferable Vote. Saat pemilu legislatif pemilih akan diberi satu surat yang berisi semua calon independent yang telah mencalonkan diri di provinsi di mana pemilih tersebut berada. Cara memilihnya dengan mencoblos satu lubang pada nama calon anggota legislatif yang sudah anda pilih. Nantinya 4 nama kandidat yang mengumpulkan suara terbanyak di tiap provinsi akan secara otomatis terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan dipilih di 33 provinsi yang setiap provinsi akan mempunyai 35-100 anggota, jumlah anggota disesuaikan dengan berapa banyak penduduk yang ada di provinsi tersebut[9].

F. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat skripsi, peneliti mencari acuan-acuan penelitian dari peneliti terdahulu guna untuk menjadi bahan pertimbangan yang dijadikan sebagai telaah pustaka. Telaah pustaka ini yang nantinya akan membantu peneliti dalam fokus kajian yang akan peneliti bahas. Telaah pustaka yang dijadikan acuan bagi peneliti antara lain:

[9] http://blogging.co.id/pemilihan-legislatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemilu Legislatif di Sampang Madura

Penelitian yang berjudul PEMILU LEGISLATIF DALAM TINJAUAN *MAQASID AL- SHARI'AH (Studi Penerapan Suara Terbanyak di Dapil Sampang III)* ini adalah penelitian Tesis yang ditulis oleh Muhakki, NIM FO.2.4.10.60. beliau adalah salah satu Mahasiswa Program Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2012. Penelitian yang beliau lakukan juga membahas mengenai Pemilu legislatif. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti dan menentukan fokus serta tujuan penelitian. Dalam penelitiannya, Tesis Muhakki tahun 2012 ini membahas tentang penerapan suara terbanyak di Dapil Sampang III yang ditinjau melalui mekanisme Maqosid Al – Shari'ah. Inti dari penelitian ini membahas mengenai :

a. Implikasi yuridis dari penerapan mekanisme keterpilihan calon legislatif dalam dimensi sistem pemilu
b. Implikasi sosiologis penerapan suara terbanyak dalam pemilu legislatif
c. Tinjauan *Maqosid Al Syari'ah* terhadap penerapan ketentuan ketentuan keterpilihan kandidat dalam pemilu legislatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhakki ini dapat disimpulkan bahwa:

a. Penerapan suara terbanyak pada pemilu 2009 berimplikasi pada pembatalan ketentuan nomor urut sebagai dasar keterpilihan calon legislative, karena nomor urut bertentangan dengan norma-norma konstitusi (UUD 1945), dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung inkonsistensi kaidah, serta bertentangan dengan pasal 5 UU No. 10/2008 tentang pemilu.

b. Implikasi sosiologis penerapan suara terbanyak dalam pemilu legislatif adalah berimplikasi pada terjadinya kompetisi panas dan perpecahan diinternal partai politik, bergesernya praktik *Money Politik* dari internal partai ke tingkat bawah (rakyat), terkikisnya karakter pemilih patronase, memunculkan anggota legislatif non ideologis, memunculkan respon-respon negatif dari pemilih terhadap calon terpilih sehingga membawa konsekuensi keterwakilan dari tipe oligarki elit ke delegasi rakyat.
c. Berdasarkan perspektif *Maqasid Al Shari'ah* system pemilihan legislatif dengan model penerapan mekanisme suara terbanyak lebih sesuai dengan prinsip-prinsip universal dan tujuan-tujuan hukum islam, karena telah memberikan perlakuan yang adil terhadap aspirasi-aspirasi umat dan mendorong terjadinya pola hubungan yang saling terikat antar kandidat dengan umat (pemilih) sehingga lebih mendekatkan pada terealisasinya kemaslahatan umum[10].

Jika penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhakki ini membahas tentang *Tinjauan Maqosid Al shari'ah* dalam menganalisis pemilu legislatif yang berlangsung di Dapil III Sampang, hal ini berbeda dengan pembahasan yang peneliti bahas walaupun keduanya sama-sama membahas mengenai Pemilu Legislatif.

[10] Diambil dari Tesisnya Muhakki, Nim: FO.2.4.10.60, (PEMILU LEGISLATIF DALAM TINJAUAN *MAQASID AL- SHARI'AH (Studi Penerapan Suara Terbanyak di Dapil Sampang III)*), Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Keislaman Konsentrasi Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kajian ini peneliti memfokuskan kajiannya mengenai Persepsi Masyarakat Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember mengenai Money Politik dan juga Bentuk- bentuk praktek money politik yang ada di desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari.

2. Tipologi dan Pertimbangan Masyarakat Pemilih Partai Politik di Ketapang Kabupaten Sampang Madura

Penelitian yang berjudul TIPOLOGI PEMILIH PARTAI POLITIK (Studi Kasus Dalam Pemilu Legislatif 2009) di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. ini adalah penelitian skripsi yang ditulis oleh Jamilatul Munawwaroh NIM E04208012. Beliau adalah salah satu Mahasiswi Fakultas Usuluddin Jurusan Filsafat Politik Islam UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2012. Penelitian yang beliau lakukan juga membahas mengenai Pemilu legislatif. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti dalam menetukan fokus kajian peneliti saat berada di lapangan. Dalam penelitiannya, Skripsi yang di tulis oleh saudara Jamilatul ini membahas mengenai tipologi masyarakat pemilih dalam pemilu legislatif 2009. Inti pokok bahasan dari penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan masyarakat pemilih dan pertimbangan memilih partai politik pada pemilu 2009.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh saudara Jamilatul Munawwaroh ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat di kecamatan Ketapang pada pemilu legislatif tahun 2009 antara lain adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Orientasi Kandidat

Orientasi terhadap kandidat, dimana warga sangat mempertimbangkan sekali kedekatan emosional dengan kandidat yang akan dipilihnya. Pemilih jenis ini dalam memilih lebih didasarkan pada faktor kedekatan emosional, karena sosial budaya dan kesamaan agama bukan pada pertimbangan program yang ditawarkan partai dan calon kandidat.

b. Orientasi *Problem Solving*

Pertimbangan memilih *Pertama,* didasarkan pada partai dan calon kandidat yang mampu mengatasi permasalahan lokal seperti keamanan, pemerataan petimbangunan, dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Ketapang. *Kedua*, didasarkan pada kekecewaan terhadap partai dan kandidat lama serta di didasarkan pada kekecewaan terhadap partai pertimbangan-pertimbangan rasional dari program-program partai dan kandidat baru yang berorientasi pada harapan-harapan masa depan masyarakat .

Dalam hal tipologi masyarakat pemilih, saudara jamilatul ini menyimpulkan ada dua tipologi pemilih antara lain yaitu:

a. Tipologi Pemilih Tradisional

Dalam tipologi ini, masyarakat pemilih di kecamatan Ketapang mendasarkan pilihannya pada faktor emosional, kesamaan agama tanpa mempertimbangkan program-program dan isu-isu dari partai dan calon kandidat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tipologi Pemilih Rasional

Tipologi pemilih rasional di Kacamatan Ketapang, pemilih yang menimbang-nimbang program Partai dan kandidat dengan kebutuhan praktis pemilih dan pada akhirnya berakibat pada menurunnya popularitas dan dominasi kandidat dari kalangan kyai [11].

Jika penelitian yang dilakukan oleh saudara Jamilatul ini membahas tentang *Tipologi Pertimbangan Masyarakat Pada Pemilu* 2009. hal ini berbeda dengan pembahasan yang peneliti bahas walaupun keduanya sama-sama membahas mengenai Pemilu Legislatif.

Dalam kajian ini peneliti memfokuskan kajiannya mengenai Persepsi Masyarakat Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember mengenai Money Politik dan juga Bentuk- bentuk praktek money politik yang ada di desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari.

Disini penulis juga mengkomparasikan penelitian ini dengan beberapa dokumen-dokumen lainnya yang relevan. Salah satunya adalah Jurnal politik yang berjudul "*Perilaku Politik Pemilih Masyarakat Perkotaan Pada Pemilu Legislatif 2009 "* yang ditulis oleh IRTANTO.

Menurut beliau permasalahan yang sedang beliau identifikasi dalam penelitian ini adalah :

[11] Diambil dari Skripsi Jamilatul Munawwaroh, Nim:E04208012, (TIPOLOGI PEMILIH PARTAI POLITIK : Studi Kasus Dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Jurusan Filsafat Politik Islam, Fakultas Usuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya pada pemilu legislatif 2009?
2. Sejauh mana mereka mendapatkan sosialisasi tentang pemilu legislatif 2009?
3. Apa yang menjadi penyebab mereka golput pada pemilu legislatif 2009?
4. Isu politik dan prioritas program apa saja yang menarik minat pemilih dalam pemilu legislatif 2009?

Dari beberapa identifikasi masalah yang diutarakan oleh saudara irtanto diatas, ada satu identifikasi masalah yang menurut peneliti sesuai dengan fokus kajian peneliti yaitu mengenai *Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih dalam Menentukan Pilihannya*. Menurut beliau ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pilihan politik antara lain adalah :

a. Faktor Sosiologis

Secara sosiologis perilaku politik pemilih cenderung banyak dipengaruhi oleh sikap kandidat dalam pergaulan yaitu mereka bersikap sopan, menghargai orang yang lebih tua maupun muda. Selain itu masyarakat cenderung mempertimbangkan tingkat pendidikan anggota legislative. Demikian pula mereka cenderung mempertimbangkan teman dalam organisasinya. Namun, teman dalam organisasi tidak mutlak pasti dipilih, teman organisasi tersebut dipilih karena perilaku dalam kehidupan sehari-harinya harus baik, mempunyai kompetensi dan integritas diri. Hal lain yang cenderung tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan politik antara lain adalah teman alumni.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Faktor Psikologis

Perilaku politik juga dipengaruhi oleh kedekatan secara personal terhadap kandidat calon. Bila kandidat anggota legislatif adalah temannya, sahabatnya, atau keluarganya, maka ia akan cenderung memilih orang tersebut sebagai anggota legislative. Walaupun mereka yang menyatakan mempertimbangkan kandidat yang kenal secara personal tidak dominan, namun hal ini paling tidak menunjukkan bahwa hubungan personal masih mempengaruhi pilihan politik mereka.

c. Faktor Pilihan Rasional

Rasionalitas seseorang akan menetukan pilihan politik terhadap kandidat tertentu. Oleh karena itu pilihan politik mereka tidak lepas dari sejauh mana tingkat rasionalitas seseorang. Beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan rasional masyarakat antara lain adalah :

1. Pengalaman Calon Legislatif
2. Status Pendidikan (Intelektual) Calon Legislatif
3. Profesionalitas Pekerjaan
4. Mantan Kalangan Birokrat atau pemerintahan
5. Isu kampanye, visi dan misi kandidat, kredibilitas kandidat, dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan rakyat
6. Kualitas SDM dan juga Life Style (Gaya Hidup) kandidat sehari- hari
7. Performa kinerja yang baik, kapabilitas dan juga profil dari partai yang mengusungnya.
8. Popularitas kandidat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Kedekatan kandidat dengan keberhasilannya dalam memimpin organisasi
10. Kedekatan kandidat dengan rakyat kecil serta kandidat yang menguntungkan secara ekonomi[12].

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan salah satu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dan tujuan untuk kegunaan tertentu. Berdasarkan cara ilmiah, data ilmiah dan kegunaan[13]. Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Terkait dengan judul dan rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif jenis fenomenologi.

Secara metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, penyajian data dari penelitian ini menggunakan format deskriptif yaitu dengan tujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena yang di ambil di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu.sebagai suatu cara atau gambaran tentang

[12] Irtanto. *"Perilaku Politik Pemilih Masyarakat Perkotaan Pada Pemilu Legislatif 2009"* : 14 - 16
[13] Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatis dan R&D* (Bandung : Alfabeta. 2003), Hal 47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi situasi ataupun fenomena tertentu[14]. Oleh sebab itu peneliti harus benar-benar mengetahui dan memahami apa yang dialami oleh para Informan ketika fenomena sosial tersebut berlangsung.

Menurut Haris Herdiansyah, Fokus kajian dari metode fenomenologi sendiri adalah pengalaman yang dialami oleh individu dan bagaimana individu tersebut memaknai pengalamannya yang berkaitan dengan fenomena tertentu yang sangat berpengaruh dan sangat berarti bagi kehidupan individu itu sendiri[15].

Muhammad Idrus menjelaskan tentang Konsep fenomenologi yang berasal dari pandangan Edmund Husserl sebagai berikut :

> Fenomenologi meyakini bahwa objek kajian ilmu itu tidak terbatas pada hal-hal yang terindra (bisa dijangkau) oleh panca indra saja, akan tetapi juga mencakup fenomena di luar panca indra tersebut seperti persepsi, pemikiran, kemauan dan keyakinan tentang sesuatu di luar dirinya. penelitian Fenomenologi melihat objek penelitian dalam konteks naturalnya. Artinya, fenomenologi melihat peristiwa secara parsial, lepas dari konteks sosial. Dengan demikian metode penelitian fenomenologi ini mengakui adanya empat kebenaran antara lain:
>
> a. Kebenaran empiris yang terindra.
> b. Kebenaran empiris logis (kebenaran secara logis dan sesuai dengan akal sehat).
> c. Kebenaran empiris etik (kebenaran yang masuk akal dan sesuai dengan ilmu pengetahuan).
> d. Kebenaran transcendental (kebenaran yang bersifat abstrak)[16].

Sedangkan menurut Juliansah Noor, Penelitian fenomenologi ini mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini

[14] Agus Salim.*Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006) hal 167
[15] Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Salemba Humanika. 2011) , Hal 67-68.
[16] Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta : Erlangga. 2009), Hal 58-59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Pendekatan fenomenologi menunda penilaian tentang sikap yang dialami sampai ditemukan dasar tertentu[17].

Fenomenologi lebih memfokuskan kajiannya untuk melihat dan memahami arti dari suatu pengalaman individu yang berkaitan dengan fenomena atau kejadian tertentu. Studi fenomenologi merupakan metode sosiologi murni yang dapat menyingkap beberapa hal sebagai berikut :

1. Esensi Masyarakat
2. Perilaku Masyarakat
3. Relasi sosial yang terbentuk

Dengan menggunakan metode tersebut seseorang dapat menemukan fakta-fakta dari puncak kehidupan sosial dan dapat menyingkap fungsi yang tersembunyi dalam tindakan sosial yang dilakukan individu[18]. Adapun cara-cara yang harus ditempuh dalam melakukan penelitian menggunakan jenis fenomenologi adalah sebagai berikut :

a. Fenomenologi cenderung menentang atau bahkan meragukan hal-hal yang diterima tanpa melalui pengamatan terlebih dahulu.
b. Secara positif, fenomenologi cenderung untuk membenarkan pandangan ataupun persepsi.

[17] Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Kencana Prenada. 2012) , Hal 36
[18] Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Salemba Humanika. 2011), Hal 67-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fenomenologi cenderung memegang teguh prinsip bahwa sebuah riset harus memfokuskan diri pada suatu yang disebut sebagai penemuan sebuah permasalahan, sebagaimana yang diarahkan oleh objek dan pembetulnya terhadap objek sebagaimana ditemukan permasalahannya[19].

Alasan mengapa peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena permasalahan dalam penelitian ini masih belum jelas, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin pada situasi sosial tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan format deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi maupun fenomena tertentu[20].

Sedangkan alasan peneliti menggunakan penelitian jenis fenomenologi adalah dengan fenomenologi kita dapat memahami suatu fenomena yang telah dialami oleh subjek penelitian sebagai contoh terkait dengan judul peneliti pemilu dan money politik tidak bisa diukur dan dilihat dengan kasat mata saja bahwa ketika masyarakat diberi sejumlah uang oleh bakal calon legislatif, masyarakat tersebut akan sukarela memilih calon tersebut atau hanya mengambil keuntungannya (uang) nya saja. Untuk mengetahui fenomena tersebut harus ada interaksi secara langsung

[19] Agus Salim. *Teori & Peradigma Penelitian Sosial.* (Yogyakarta : Tiara Wacana. 2001), Hal 167-168
[20] Burhan bungin. *Metodologi Penelitian Sosial.* (Surabaya : Airlangga University Press. 2001), Hal 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan individu yang terkait dengan pengalaman-pengalaman yang mereka alami kemudian dideskripsikan oleh peneliti sehingga diperoleh suatu gambaran yang ringkas terkait dengan kondisi yang dialami oleh para subjek.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Burhan Bungin, Dalam sebuah penelitian ilmiah peneliti diharuskan untuk menentukan lokasi penelitian, dalam hal ini penelitian yang akan penulis lakukan bertempat di sebuah dusun yang bernama dusun Sukokaryo yang terletak di desa Sukoreno kecamatan Umbulsari kabupaten Jember Jawa timur. Peneliti sengaja memilih lokasi ini karena mempunyai beberapa pertimbangan. *Pertama,* lokasi tersebut merupakan tempat kelahiran peneliti sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan riset penelitian ini. *Kedua,* jika dilihat dengan kasat mata tingkat money politik masih tinggi sedangkan tingkat partisipasi masyarakat rendah, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah politik. *Ketiga* masayarakat pada masa modern ini saat ini merasa acuh tak acuh atau bahkan merasa bahwa masalah politik tesebut merupakan masalah yang kompleks dan hanya masyarakat kelas atas sajalah yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hal perpolitikan. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa masalah politik tersebut merupakan masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya masyarakat kelas atas akan tetapi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah pun mempunyai hak dan kewaiban yang sama dalam menyelesaikan masalah perpolitikan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini kurang lebih satu bulan karena peneliti disini menggunakan metode fenomenologi. Peneliti harus terjun lapangan secara langsung serta mengetahui pandangan masyarakat mengenai money politik dan juga bentuk- bentuk dari money politik itu sendiri.

Sedangkan penentuan waktu penelitian sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

Waktu Penelitian

NO	Bentuk Kegiatan	Waktu
1	Pra Studi Lapangan	Akhir Bulan Agustus 2014
2	Studi Lapangan	19 April – 19 Mei 2015
3	Pembuatan Laporan	Bulan Juni

3. Pemilihan Subyek Penelitian

Subyek penelitan adalah sumber tempat peneliti untuk memperoleh keterangan kepada sesorang atau sesuatu yang mengenainya untuk memperoleh keterangan tentang permasalahan yang akan diteliti[21]. Dalam penelitian ini penulis memilih subyek penelitiannya adalah masyarakat dusun Sukokaryo desa Sukoreno

[21] Tatang M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta : PT Grafindo Persada. 1995), Hal 92-93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yang berumur 17 tahun keatas atau telah mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali dan para pelaksana pemilu yang mengetahui tentang praktek money politik. Selain itu penulis juga mengambil subyek penelitan yaitu beberapa sarjana yang telah lulus kuliah yang mengetahui persis mengenai seluk beluk politik. Hal tersebut digunakan untuk mengkomparasikan dan mendapatkan informasi yang akurat mengenai politik uang dan juga untuk mengetahui pendapat mereka tentang praktek politik uang yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

4. Sumber dan Jenis Data

Adapun yang menjadi sumber data (*informan*) dalam penelitian ini adalah masyarakat dusun Sukokaryo desa Sukoreno kecamatan Umbulsari kabupaten Jember yang berumur 17 tahun keatas atau telah mempunyai hak pilih dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali, dan juga para peserta pemilu yang terlibat dan mengetahui praktek serta bentuk dari money politik. Selain itu penulis juga mengambil subyek penelitan yaitu sarjana yang telah lulus kuliah yang benar-benar mengetahui tentang masalah money politik. Hal tersebut perlu dilakukan karena untuk mengkomparasikan dan mendapatkan informasi yang akurat mengenai politik uang dan juga untuk mengetahui pendapat mereka tentang politik uang yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksana dan peserta pemilu yang penulis maksud disini adalah seperti yang tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

Pelaksana dan Peserta Pemilu

Pelaksana PEMILU	Peserta PEMILU
1. KPPS (Ketua Panitia Pemungutan Suara)	1. Partai Politik
2. PPS (Panitia Pemungutan Suara)	2. Calon Legislatif
3. PPK (Panitia Pemungutan Kecamatan)	3.Pemilih. a. Masyarakat Awam b. Pemilih Pemula (Akademisi) c. Tokoh Masyarakat

Sedangkan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan secara mentah dan masih memerlukan analisis lebih lanjut[22]. Jenis data primer dalam

[22] Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Praktek* (Jakarta : Rieneka Cipta. 2004), Hal 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini secara langsung melalui sumber data angket, wawancara, observasi dan beberapa cara lainnya. Yang merupakan jenis data primer adalah masyarakat dusun Sukokaryo desa Sukoreno kecamatan Umbulsari kabupaten Jember yang berumur 17 tahun keatas dan minimal telah memiliki hak pilih dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali. Para peserta pemilihan umum. Serta sarjana yang ada di dusun tersebut dan benar-benar mengetahui tentang permasalahan money politik.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua atau setelah sumber data primer yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Data ini bisa berupa buku, majalah, dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian[23].

5. Tahap-Tahap Penelitian

a. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap pra lapangan, peneliti sudah sudah membaca dan melihat secara kasat mata bahwa ada masalah yang menarik untuk diteliti. Peneliti pun telah memberikan pemahaman bahwa masalah itu pantas dan layak untuk diteliti. Peneliti juga telah melakukan pengamatan terkait dengan masalah yang akan diteliti dan menjadi fokus kajian.

[23] Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Airlangga University Press. 2001), Hal 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lexy J Moeloeng menjelaskan bahwa ada beberapa tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dan ditambah dengan satu persoalan etika, kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Merumuskan Rancangan Penelitian

Setelah menemukan fenomena sosial, peneliti merumuskan rancangan penelitian atau proposal yang memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, definisi konsep dan teori. Fungsi dari proposal penelitian adalah untuk merencanakan secara sistematis kegiatan penelitian agar lebih terarah dan terealisasi sesuai harapan. Upaya untuk lebih menyempurnakan perumusan dan penyusunan proposal peneliti melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan akhirnya diakhiri dengan seminar proposal.

2) Menentukan Lapangan Penelitian

Peneliti memilih penelitian khususnya pada “Pemilu Dan Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”.

3) Mengurus Perizinan

Langkah pertama untuk mendapatkan izin melakukan galian data dari sumber data adalah mengutarakan dan memahamkan maksud dan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menjajaki dan Memilih Lapangan

Pada tahap ini belum sampai pada titik yang menyikapi bagaimana peneliti masuk lapangan, namun telah menilai keadaaan lapangan dengan hal-hal tertentu.

5) Menentukan Informan

Lexy J Moeloeng mengemukakan bahwa Informan adalah orang orang dalam latar penelitian[24]. Informan disini berfungsi memberikan informasi dan keterangan tentang situasi dan kondisi latar penelitian baik dengan cara *Sharing* (tukar pikiran) atau membandingkan kejadian dari subjek lain. Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan yang akan memberikan data atau informasi mengenai permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini informan yang dipilih oleh peneliti yaitu masyarakat Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yang telah memiliki hak pilih, dan peserta pemilu yang mengetahui adanya kecurangan dalam bentuk money politik dalam pemilu legislative 2014. Selain itu peneliti juga akan bertanya kepada sarjana yang mengerti tentang politik mengenai tanggapan mereka terhadap *Money Politik.* Hal tersebut peneliti lakukan memiliki maksud untuk membandingkan dan menyeimbangkan antara tanggapan dari warga masyarakat dengan tanggapan dari para peserta pemilu (dalam hal ini tim sukses calon kandidat) yang terlibat dalam pemilu legislative 2014 di daerah Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

[24] Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2000), Hal 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Kelengkapan penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain yaitu alat tulis (Pensil, Ballpoint, Buku catatan dan Handphone).

Dalam hal etika, peneliti sangat menjaga kehati-hatian karena menyangkut hubungan dengan orang yang berkenaan dengan data-data yang diperoleh dari informan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Sebab dengan sopan santun yang sangat dijaga oleh peneliti, diharapkan tercipta kerjasama yang menyenangkan antara kedua belah pihak.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

1. Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri

Untuk memahami tahap ini, peneliti perlu memahami konteks penelitian terlebih dahulu, kemudian peneliti mempersiapkan diri baik secara mental maupun fisik agar nantinya disaat peneliti terjun ke lapangan semua kegiatan interview dapat berjalan dengan lancar dan baik. Jika peneliti memanfaatkan dan berperan serta maka hendaknya hubungan akrab antara subyek dengan penelitian dapat bekerja sama dan tukar pikiran serta informasi[25].

2. Memasuki Lapangan

Untuk memasuki lapangan, peneliti mencari data atau informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dijadikan focus penelitian. Sebelumnya peneliti pada tahap ini perlu memahami konteks lapangan yang akan dijadikan objek

[25] Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* . (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2000), Hal 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, baru setelah itu peneliti mempersiapkan diri untuk terjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti harus menempatkan diri dengan keakraban hubungan, menjaga sikap, dan patuh pada aturan lapangan serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar peneliti dapat dengan mudah mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti telah mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang ia inginkan. Selanjutnya dilakukan proses pemulihan data yang disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian. Karena dalam proses pencarian data tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah data terkumpul selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan dan melakukan analisis terhadap data di lapangan dengan teori yang dilakukan dalam penelitian, kemudian peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukannya.

d. Tahap Penulisan Laporan

Penulisan laporan adalah tahap akhir dari proses pelaksanaan penelitian. Setelah semua komponen-komponen terkait dengan data dan hasil analisis data serta mencapai suatu kesimpulan, peneliti mulai menulis laporan dalam konteks laporan penelitan kualitatif. Penulisan laporan disesuaikan dengan konteks dalam penulisan penelitian kualitatif dengan tidak mengabaikan kebutuhan peneliti terkait dengan kelengkapan data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsini Arikunto, ada beberapa data-data yang harus digunakan oleh peneliti dalam sebuah penelitian antara lain :

a. Observasi

Observasi digunakan untuk memulai penelitian. Observasi adalah kegiatan yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Pedoman observasi meliputi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati oleh peneliti[26]. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung terhadap subyek yang akan diteliti yaitu masyarakat dusun Sukukaryo desa Sukoreno kecamatan Umbulsari kabupaten Jember yang berumur 17 tahun keatas dan telah mempunyai hak pilih, para peserta pemilu, meliputi masyarakat dan tim sukses dari kandidat calon dan sarjana yang telah lulus kuliah dan mengetahui secara pasti mengenai politik serta hal-hal yang berkaitan dengan perpolitikan, seperti halnya Money Politik ini. Observasi ini peneliti lakukan pada bulan Agustus 2014

b. Interview dan wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yakni pihak yang mengajukan

[26] Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rieneka Cipta. 2002), Hal 156-157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanyaan dan narasumber yakni pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu[27].

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode petunjuk umum wawancara. Oleh karena itu, peneliti membuat rumusan pertanyaan dan urutannya disesuaikan dengan keadaan responden. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana bentuk Money Politik dalam pemilihan calon legislatif pada pemilu 2014 di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, serta Mengetahui penyebab terjadinya Money Politik di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Dalam segi pelaksanaannya, peneliti menggunakan interview *bebas terpimpin* yaitu kombinasi antara *interview bebas* dan *interview terpimpin*. Interview bebas adalah model wawancara yang membebaskan pewawancara menanyakan apa saja. Tetapi juga berpedoman pada data yang dikumpulkan dan yang dibutuhkan. Interview terpimpin yaitu interview yang dilakukan dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur dan sistematis[28].

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses pengambilan data terkait dengan tindakan praktek politik uang dalam pemilihan caleg pada pemilu 2014 di Desa Sukoreno

[27] Lexy J. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya. 2008), Hal 187
[28] Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rieneka Cipta. 2002), Hal 155-156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Dalam hal ini peneliti mengambil dari dokumentasi yang ada di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sesuai dengan focus kajian yang akan diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ada dua tahapan yaitu ketika peneliti berada di lapangan dan ketika peneliti telah meninggalkan lapangan. Ada tiga prosedur analisis data saat berada di lapangan antara lain adalah reduksi data, display data dan verifikasi data[29].

Reduksi data adalah proses analisis dan pengurangan data yang di dapat dari lapangan yang tidak ada hubungannya dengan focus kajian. Hal ini digunakan agar hasil dari penelitian ini lebih terfokus pada masalah yang ingin di teliti.

Penyajian data adalah menganalisis temuan yang didapat dari lapangan untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi di lapangan dan merencanakan hal yang ingin dilakukan selanjutnya berdasarkan pemahaman dari analisis temuan tersebut. Sedangkan verifikasi data adalah proses pengambilan kesimpulan dan verifikasi data[30].

[29] Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif , Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru* (Jakarta : Universitas Indonesia. 1984), Hal 31

[30] Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta. 2003), Hal 252

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data/ Validasi Data

Validasi data dalam sebuah penelitian sangatlah penting dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Trianggulasi*. *Trianggulasi* adalah terknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain yang berada diluar data itu yang berfungsi sebagai pembanding terhadap data dari lapangan. Teknik trianggulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber-sumber yang lain.

Data penelitian dapat dibandingkan dengan teknik trianggulasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil pengamatan hasil wawancara.
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara personal.
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
d. Pandangan dari rakyat biasa yang berpendidikan tinggi, menengah atau orang yang berpengaruh.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan[31].

[31] Lexy J. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya. 2008), Hal 331

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Sistematika Pembahasan

Sistematika adalah sebuah urutan kerangka berfikir dalam penulisan penelitian. Untuk mempermudah pembahasan penelitian diperlukan sebuah sistematika pembahasan secara rinci dari satu bab ke bab yang lain yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Penelitian ini membahas tentang "*Pemilu Dan Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*".

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini peneliti memberikan gambaran tentang latar belakang masalah yang hendak diteliti. Setelah itu menentukan rumusan masalah dalam penelitian tersebut serta menyertakan tujuan dan manfaat penelitian. Peneliti juga menjelaskan tentang definisi konsep, metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian tersebut serta menyertakan tujuan dan manfaat penelitian. Peneliti juga menjelaskan tentang definisi konsep, metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber dan jenis data, tahap-tahap penelitian, terknik pengumpulan data, analisis data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam bab I ini peneliti juga menjelaskan tentang sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab kajian teori ini, peneliti mencoba untuk memberikan pemahaman tentang teori yang akan digunakan dalam menganalisis masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab analisis data, peneliti memberikan gambaran tentang data yang diperoleh baik data primer maupun data skunder. Penyajian data dibuat secara tertulis dan dapat juga disertakan gambar, tabel, atau bagian yang mendukung data. Dalam bab ini peneliti juga memberikan gambaran tentang data-data yang dikemas dalam bentuk analisis deskriptif. Setelah itu peneliti akan melakukan tahap analisis data dengan menggunakan teori yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup, penulis menuliskan kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian selain itu juga peneliti memberikan saran kepada para pembaca laporan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id